



International
Labour
Organization

▶ Program Better Work di Indonesia - Tahap III



DONOR

Australia (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan/DFAT)
Jerman (Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Federal/BMZ);
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Belanda (Kementerian Luar Negeri)
Swiss (Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi/SECO)



DURASI

- Tahap I (Juli 2010 – Juni 2012, 2 tahun)
- Tahap II (Juli 2012 – Juli 2015, 3 tahun)
- Tahap III (1 Januari 2016 - 30 Juni 2022)



CAKUPAN

Industri pakaian di Jakarta dan sekitarnya, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta.



FOKUS

Better Work berupaya menciptakan sebuah industri di mana pabrik-pabrik garmen dan alas kaki memberikan peluang yang aman, inklusif dan menguntungkan bagi para pencari kerja perempuan dan laki-laki, dan di mana para pemilik pabrik dan pembeli merancang kebijakan mereka agar menghormati hak-hak pekerja sebagai mekanisme untuk menumbuhkan dan memperluas usaha mereka. Untuk itu, tujuan jangka panjang Better Work adalah peningkatan kesehatan dan kesejahteraan pekerja (khususnya pekerja perempuan) yang pada gilirannya juga meningkatkan kesejahteraan keluarga pekerja, sementara di saat yang sama menumbuhkan industri nasional melalui peningkatan produktivitas dan profitabilitas di pabrik-pabrik



MITRA/
PENERIMA
MANFAAT

- Kementerian Ketenagakerjaan
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
- Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)
- Konfederasi-konfederasi Serikat Pekerja
- Pembeli Internasional



KONTAK

Maria João Vasquez
Kepala Penasihat Teknis
vasquez@ilo.org



216 PABRIK
DALAM PROGRAM



399.282 PEKERJA
(81% PEREMPUAN)



35 MERK
DAN RITEL



41 STAF BETTER WORK
INDONESIA

Indonesia sedang bergeser dari perekonomian yang didominasi sektor pertanian ke perekonomian yang lebih mengarah kepada sektor industri dan jasa di daerah perkotaan. Pertanian masih merupakan sektor yang paling banyak mempekerjakan tenaga kerja, sebanyak 40,8 juta orang, diikuti sektor perdagangan (25,8 juta) serta sektor jasa sosial dan pemerintahan (18,5 juta) pada Februari 2014. Sektor manufaktur mempekerjakan 15,4 juta orang atau 13 persen dari jumlah keseluruhan lapangan kerja pada periode yang sama. Pekerjaan di bidang manufaktur telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan semakin meningkat (dalam hal pangsa sektoral dan angka absolut) dibandingkan sebelum tahun 1998.¹ Pada 2015, sektor manufaktur memberikan kontribusi hingga 22 persen dari PDB Indonesia.²

Berdasarkan survei tenaga kerja 2015, sebanyak 2,2 juta³ orang bekerja di sektor pakaian. Namun sebagian besar dari 1,6 juta bekerja di perusahaan-perusahaan kecil yang jarang dikaitkan dengan pasar ekspor. Berdasarkan survei terbaru dari Badan Statistik Indonesia (BPS) tahun 2013, sektor pakaian jadi (ISIC 141)

1 Informasi terbaru Tren Ketenagakerjaan dan Sosial Agustus 2014

2 Sumber: BPS 2015 <http://bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/827>

3 Sumber: BPS (2015) Laporan Nasional, Badan Pusat Statistik, Jakarta

mempekerjakan 516.352 pekerja di 1.749 perusahaan besar dan menengah.⁴ Dari semua perusahaan ini, 89,38 persen dari hasil produksinya diekspor.⁵ Kendati terjadi penurunan jumlah pekerja, dibandingkan antara tahun 2012 dan 2013 akibat penurunan industri, produktivitas pekerja dan persentase barang yang diekspor semakin meningkat selama beberapa tahun terakhir.

Tanpa perjanjian perdagangan bebas, produsen tekstil dan garmen Indonesia saat ini dibebankan bea yang berkisar antara 11 hingga 30 persen untuk tujuan ekspor utama, termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS). Negara ini sedang melakukan pembicaraan terkait perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA) dengan Uni Eropa yang sudah lama tertunda, yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ke blok beranggotakan 28 negara. Pada 2015, negara/wilayah tujuan, pasar terbesar untuk tekstil Indonesia dan ekspor produk tekstilnya adalah AS, yang menyumbang 31 persen, diikuti Uni Eropa dengan 16 persen, Jepang 10 persen, Turki 5 persen dan ASEAN 7 persen.⁶

Industri ini juga menghadapi sejumlah tantangan baru dalam beberapa tahun terakhir, termasuk penyesuaian harga listrik secara otomatis. Harga listrik berfluktuasi setiap bulan tergantung pada nilai tukar rupiah, harga minyak mentah dan inflasi. Depresiasi mata uang lokal terhadap dolar AS telah mendorong kenaikan harga listrik, yang berkontribusi antara 18 hingga 26 persen terhadap biaya di industri tekstil dan garmen.

Selanjutnya setengah dari bahan baku sektor diimpor dan karena itu sangat dipengaruhi oleh devaluasi rupiah. Tantangan lain dari sektor ini adalah infrastruktur yang tidak memadai dengan kondisi yang buruk dari jalan dan pelabuhan. Jika reformasi politik dilaksanakan seperti yang direncanakan, maka diharapkan biaya untuk listrik dan logistik akan menurun dari waktu ke waktu.

Sementara industri garmen menawarkan banyak negara, termasuk Indonesia, kesempatan untuk menumbuhkan ekonomi mereka, mendukung pembangunan yang inklusif, dan mempromosikan pemberdayaan dan partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja, pada saat yang sama masih ada tantangan untuk mengubah peluang tersebut menjadi kenyataan. Persoalan di tingkat pelaksanaan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dan praktik sumber daya manusia (termasuk pelecehan verbal terhadap pekerja), merupakan tantangan-tantangan utama dalam industri ini. Pabrik mungkin menganggap kondisi kerja yang baik sebagai biaya bisnis dan bukan sebagai manfaat. Karenanya, investasi dalam peningkatan peraturan keselamatan atau hubungan industrial yang lebih baik masih belum tercapai.

Lembaga pengawasan ketenagakerjaan Indonesia, sebagai bagian dari Kementerian Ketenagakerjaan, sedang berupaya menegakkan undang-undang yang ada dan mempromosikan budaya lingkungan kerja yang lebih baik. Meski pabrik harus memiliki pakar

ketenagakerjaan bersertifikat sebagai staf, kenyataannya hal ini belum dapat terpenuhi. Selain itu, pengawas ketenagakerjaan masih terus menghadapi persoalan kapasitas, sehingga sulit untuk menegakkan perundangan dan standar.⁷ Sejalan dengan upaya pengawasan untuk terus meningkatkan kemampuan dan mengintegrasikan pakar ketenagakerjaan ke dalam semua tempat kerja yang memenuhi syarat, pabrik-pabrik garmen masih berjuang memenuhi standar minimum terkait dengan kondisi kerja.

Menyadari tantangan-tantangan ini, banyak pembeli internasional telah mengembangkan program audit sosial mereka sendiri. Namun, program audit ini saling tumpang tindih dan akibatnya hanya melakukan pendekatan audit yang tidak secara lebih mendalam menggali investasi jangka panjang serta perubahan yang berkelanjutan. Hanya sedikit program yang mencoba menangani kepatuhan, sistem, dan isu kebijakan serta praktik di semua tingkatan dalam rantai pasokan.

Dalam konteks Indonesia, biaya tak terduga dalam menjalankan pabrik tekstil merupakan biaya yang tidak jelas di industri terkait (misalnya, biaya listrik)⁸ dan tantangan yang berkaitan dengan bea impor/ekspor yang tinggi berarti bahwa pendekatan yang melibatkan semua pemangku kepentingan sangat diperlukan. Untuk itu, dorongan terhadap perubahan di tingkat sektor dalam praktik dan kebijakan, termasuk penguatan pengawasan ketenagakerjaan seperti yang disebutkan di atas, merupakan langkah yang diperlukan untuk memastikan dampak yang berskala lebih luas. Menjalin kerjasama dengan pabrik, dan juga dengan lembaga internasional, pemerintah dan pembeli berarti bahwa pabrik-pabrik yang saat ini tidak melakukan ekspor dapat menikmati sejumlah keuntungan positif akibat membaiknya kebijakan dan praktik kerja.^{9 10}

Better Work berupaya mengatasi masalah di atas pada skala internasional dengan bergerak menjauhi kondisi kerja bengkel-bengkel kerja (sweatshops) dan menggantinya dengan model yang baik bagi pekerja dan baik untuk bisnis. Better Work ingin menginspirasi perubahan mentalitas dari pengelola pabrik, pemerintah dan pekerja agar merasa memiliki dalam mendorong perubahan. Pada tingkat praktis, ini artinya bekerja secara langsung dengan pabrik, pemerintah, serikat pekerja dan pembeli untuk menentukan tindakan konkret yang dapat memperbaiki kondisi kerja, produktivitas dan stabilitas industri.

▶ Program Better Work

Better Work Indonesia merupakan kemitraan antara Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan

4 Menurut BPS kategori perusahaan kecil adalah memiliki 5 hingga 19 pekerja, perusahaan menengah memiliki 20 hingga 99 pekerja dan perusahaan besar memiliki 100 atau lebih pekerja. Definisi ini berbeda dari definisi ILO (menengah 50 hingga 250 pekerja dan kecil 10 hingga 50 karyawan).

5 Sumber: BPS (2012) Indikator Industri Manufaktur/Pengolahan, Indonesia 2012, Badan Pusat Statistik.

6 The Jakarta Post, 29 Juli 2015.

7 Seperti yang dibahas dalam Proposal Pendanaan Better Work untuk Proyek Peningkatan Tempat Kerja, sub-proyek "Menciptakan Kemitraan Kuat dengan Kementerian Ketenagakerjaan Nasional" yang akan didanai oleh Disney. Proyek ini sejalan dengan proyek ILO yang berjudul "Penguatan Kepatuhan Tempat Kerja melalui Pengawasan Ketenagakerjaan."

8 Biaya menjalankan pabrik semakin sulit untuk dihitung mengingat biaya listrik yang tak terduga, tuntutan untuk upah minimum yang lebih tinggi, depresiasi mata uang lokal terhadap dolar AS.

9 Menurut BPS kategori perusahaan kecil adalah memiliki 5 hingga 19 pekerja, perusahaan menengah 20 hingga 99 pekerja dan perusahaan besar memiliki 100 atau lebih pekerja. Definisi ini berbeda dari definisi ILO (menengah 50 hingga 250 pekerja dan kecil 10 hingga 50 pekerja).

10 Sumber: BPS (2012) Indikator Industrial Manufaktur/Pengolahan, Indonesia 2012, Badan Pusat Statistik

International Finance Corporation (IFC). Program ini bertujuan meningkatkan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan dan meningkatkan daya saing dalam rantai pasokan global. Better Work berfokus pada solusi yang terukur dan berkelanjutan, melalui penguatan kerjasama antara pemerintah, organisasi pengusaha dan organisasi pekerja serta pembeli internasional. Perlindungan hak-hak pekerja membantu pembagian manfaat perdagangan untuk mempromosikan pembangunan manusia, sosial dan ekonomi. Kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan dapat membantu perusahaan menjadi lebih berdaya saing, dengan meningkatkan akses atas pasar dan pembeli baru.

Program Better Work dibangun berdasarkan pengalaman proyek ILO Better Factories di Kamboja, yang tidak hanya berhasil meningkatkan kondisi kerja dan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan, tetapi juga meningkatkan daya saing melalui pemantauan perbaikan dan pelatihan di tingkat pabrik.

Better Work Indonesia memadukan penilaian yang dilakukan oleh perusahaan secara mandiri dengan layanan konsultasi dan pelatihan guna mendukung perbaikan praktis melalui kerjasama di tempat kerja. Menggunakan sistem manajemen informasi online yang dirancang khusus, pabrik dapat berbagi penilaian dan informasi perbaikan dengan para pembeli mereka. Ini pada gilirannya memungkinkan pembeli untuk mengurangi audit mereka sendiri dan terfokus pada upaya memperbaiki masalah dan solusi berkelanjutan. Salah satu fitur program Better Work yang berbeda adalah penekanan pada pemecahan masalah kepatuhan di tingkat pabrik dan sektoral melalui dialog antara pekerja dan manajemen, serta antara pemangku kepentingan di sektor ini. Selain pelayanan inti dan dialog sosial, Better Work Indonesia juga memainkan peran katalistik dalam tata kelola pasar tenaga kerja melalui peningkatan dan berbagi pengetahuan yang didapatkan program kerjanya guna mempengaruhi kebijakan dan praktik nasional.¹¹

► Beragam Penerima Manfaat

Penerima manfaat utama termasuk pemerintah, pekerja, pabrik dan pembeli dalam rantai pasokan global. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi dalam Better Work Indonesia termasuk:

- **Pabrik** - Peningkatan akses pasar dengan memperlihatkan standar kepatuhan ketenagakerjaan kepada pembeli internasional, peningkatan reputasi, mengurangi keluar masuk pekerja, audit sosial yang lebih sedikit, mengurangi beban audit, peningkatan produktivitas dan daya saing;
- **Pekerja** - perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak pekerja, perbaikan kondisi kerja dan hidup, dan meningkatkan kesempatan kerja yang layak;

- **Pemerintah** - Pertumbuhan ekspor melalui peningkatan akses pasar, peningkatan lapangan kerja, industri yang lebih kompetitif, bisnis yang mendorong reformasi lingkungan, peningkatan kapasitas dalam administrasi ketenagakerjaan, serta pengakuan untuk mempromosikan pekerjaan yang layak; dan
- **Pembeli dan Penyalur Internasional** - beban audit berkurang dan, sumber pasokan yang aman dan etis, dipadukan dengan peningkatan reputasi antara konsumen dan kontribusi yang terbukti memperbaiki kondisi kerja, manajemen yang lebih efektif di tingkat pabrik bagi pembeli dan penyalur untuk diajak bekerja sama, peningkatan stabilitas hubungan dan keselarasan seluruh rantai pasokan global.

► Industry and Country Update

Pada 2018, ekspor garmen dan pakaian jadi menyumbang USD 7,8 miliar, sedikit menurun dari tahun sebelumnya (USD 7,9 miliar). Pasar Amerika Serikat menyumbang lebih dari 50 persen ekspor, diikuti oleh Jerman dan Jepang. Ekspor garmen menghasilkan sekitar 4 persen dari total nilai ekspor pada 2018.

Industri garmen dan pakaian jadi mempekerjakan sekitar 800.000 pekerja di perusahaan besar dan menengah, Sekitar 60 persen di antaranya terkait dengan pasar ekspor. Industri ini terkonsentrasi di wilayah Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah Indonesia.

Pemerintah Indonesia terus terlibat dalam negosiasi perjanjian perdagangan utama dengan Uni Eropa. Setelah pemilihan Presiden baru-baru ini, pemerintah telah mengumumkan revisi mekanisme penetapan upah minimum saat ini (Peraturan Pemerintah No. 78) dan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan. Prioritas besar bagi pemerintah mendatang adalah pengembangan keterampilan bagi tenaga kerja Indonesia.

Pada Mei 2019, upah padat karya dikeluarkan untuk Kabupaten Purwakarta dan upah Tekstil dan Produk Tekstil dikeluarkan untuk Kabupaten Bogor. Kedua kabupaten tersebut terletak di Jawa Barat dan penerbitan upah yang berada di bawah upah minimum kabupaten menjadi problematis. Ada sejumlah demonstrasi di Jakarta dan kawasan industri di sekitarnya terkait dengan pengumuman revisi UU Ketenagakerjaan yang saat ini sedang digugat oleh banyak serikat pekerja yang ada.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) telah membuat, dengan dukungan BWI, sebuah direktori perusahaan ekspor garmen dan sebuah studi tentang masa depan sektor garmen di Indonesia. Studi ini telah dipresentasikan kepada konstituen tripartit ILO pada akhir Agustus 2019 dan diharapkan akan segera diterbitkan. Ini akan menjadi dasar pengajuan Apindo kepada pemerintah mendatang berdasarkan prioritas dan peta jalan sektor tersebut. Sektor-sektor manufaktur dan padat karya terus menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan nasional dengan serangkaian kebijakan dan tindakan baru yang sedang dirancang.

¹¹ Contohnya termasuk peningkatan kapasitas pengawas ketenagakerjaan lokal, khususnya dalam hal K3; dan memberikan saran kepada Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program kepatuhan standar ketenagakerjaan dan membantu pengembangan alat penilaian kepatuhan mandiri.